



UNIVERSITAS ANDALAS

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, DAN RASIO KETERGANTUNGAN
DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**



DR. SRI MARYATI, SE., M.Si.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

DEPARTEMEN EKONOMI

PADANG

2023

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, DAN RASIO KETERGANTUNGAN
DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

oleh

Fikri Ramadhan
1910512033

Diajukan ke Departemen Ekonomi,
pada tanggal 22 Agustus 2023, untuk memenuhi sebagian
syarat dalam mencapai derajat
Sarjana Ekonomi

Abstrak

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Banyak cara yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu negara, salah satunya dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan rasio ketergantungan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2022. Penelitian ini juga mengkaji dampak diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kualitas SDM di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk *time series* yang berasal dari data Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian deduktif dengan pendekatan kuantitatif, dan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel PDRB, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan IPM di Sumatera Barat. Sedangkan variabel rasio ketergantungan daerah memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap IPM Sumatera Barat. Pemberlakuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap IPM yang artinya terjadi peningkatan pada kualitas SDM di Provinsi Sumatera Barat setelah pemberlakuan UU ini.

Kata Kunci : IPM, PDRB, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Rasio Ketergantungan Daerah.

Pembimbing Skripsi : Dr. Sri Maryati, SE., M.Si.